EDISI 163/TAHUN XIV/APRIL 2013

TROBOS Livestock

MEDIA AGRIBISNIS PETERNAKAN

ceva
www.ceva.co.id

CLOSED HOUSE
UNTUK LAYER

SOS Sapi Perah Indonesia

Rp 18.000,-
ISSN 2301-4547
9 772301 452475
www.trobos.com

PT. AYAM KAMPUNG
INDONESIA
www.ayamkampung.co.id

ZHENG CHANG

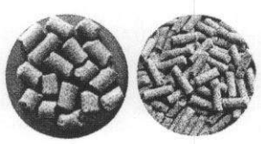

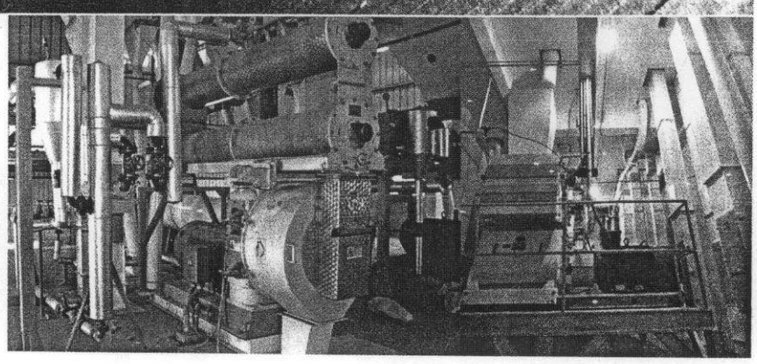

Prof Muladno*

Harus Ada Keberpihakan Bagi Peternak

Masalah daging masih ramai. Apalagi dengan tertangkapnya Presiden Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) beberapa waktu lalu, yang disangka terlibat dalam kasus impor daging. Harga daging juga masih terus bergoyang. Dilaporkan bahwa di Halmahera, harga daging sapi sudah menembus Rp 110.000 per kg tetapi di Salatiga Jawa Tengah dilaporkan hanya Rp 75.000 per kg. Dua informasi tersebut sangat dapat dipercaya sumbernya. Rentang harga daging sangat lebar tetapi yang jelas peternak merasa nyaman dan tentram dengan harga sapi sebesar Rp 30.000 sampai Rp 34.000 per kg berat hidup.

Dengan rentang harga daging seperti itu, sulit melakukan penilaian dalam memutuskan apakah perlu menambah kuota impor atau mempertahankan kuota impor sesuai skenario swasembada daging. Pemerintah pastinya bertahan dengan target swasembada 2014 dengan hanya memberi izin impor maksimum 10 % dari total kebutuhan pada 2014 nanti sedangkan para importir pesimis dengan kebijakan pemerintah tersebut.

Seluruh pemangku kepentingan di bidang ini harus bersinergi untuk memberdayakan 6,2 juta peternak sapi sebagai tulang punggung penyedia daging secara nasional. Selama ini sebagian besar dari mereka hanya dibantu agar punya ternak dan dapat beternak tetapi kurang memperoleh bimbingan agar menjadi pengusaha ternak. Kondisi peternak semakin parah jika jumlah impor daging tidak dikendalikan sebagaimana pernah terjadi pada 2009 - 2010 lalu.

Untuk jangka panjang, usaha 6,2 juta peternak berskala kecil harus dibenahi agar negara ini tidak tergantung pada impor tasi saja seiring dengan pertambahan penduduk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan protein hewani. Saat ini, kondisi peternak berskala kecil di Indonesia jika dibandingkan dengan peternak di Australia dapat diumpamakan seperti kondisi angkot Bogor di Bogor (analogi untuk peternak Indonesia) dan Garuda Indonesia (analogi untuk peternak Australia).

Dua kondisi yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan tersebut dihadapkan satu sama lain secara ekonomis. Pakai rumus apapun, tidak layak menyebut mana yang kalah dan mana yang menang antara angkot Bogor dan Garuda Indonesia karena keduanya tidak dapat dibandingkan.

Selama ini 6,2 juta peternak tersebut adalah juga manajer dari "perusahaan" peternakannya sendiri walau masing-masing hanya memelihara 1 - 3 ekor saja. Karena mereka manajer sekaligus pemilik, mereka semaunya saja dalam mengelola ternak dan sesukanya saja dalam menjual ternak hasil peliharaannya. Ketika butuh uang dijual, ketika tidak butuh tetap dipelihara. Tidak peduli sapi jantan atau betina, tidak peduli pula apakah sapi betina bunting atau tidak bunting.

Penulis tidak bermaksud agar pemerintah mengubah peternak Indonesia yang persis berperilaku seperti moda transportasi angkot Bogor menjadi seperti peternak Australia yang persis moda transportasi Garuda Indonesia. Penulis hanya berharap agar pemerintah berpihak dan memberi kemudahan kepada peternak sebagaimana pemerintah memberi banyak kemudahan pada moda transportasi bis bandara DAMRI.

Bis ini diberi hak eksklusif untuk antar jemput penumpang ke dan dari bandara, disediakan terminal tersendiri, harga tiket juga ditentukan, pasarnya juga sudah terjamin keberlanjutannya. Ini namanya ada keberpihakan pemerintah demi kepentingan publik. Keberpihakan seperti itu seharusnya diberikan juga kepada peternak berskala kecil melalui berbagai fasilitas yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah "manajer" dari 6,2 juta menjadi jauh lebih sedikit. Artinya, harus ada upaya dari semua pemangku kepentingan agar peternak mau diorganisir untuk berbisnis secara kelompok. Bukan hanya berkelompok tetapi tidak mengerti bisnis.

Berkurangnya jumlah "manajer" bukan berarti berkurangnya jumlah peternak tetapi justru dapat menambah jumlah peternak jika bisnis secara berkelompok tersebut dapat berkembang dan lebih menguntungkan. Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi memang pekerjaan sangat sulit. Kata kuncinya adalah bahwa harus ada perubahan cara berpikir, harus mengerti manajemen dan organisasi yang baik, harus mengerti makna efisiensi dan produktivitas, harus memahami betul cara beternak yang benar dan baik, dan harus-harus lainnya.

Pemerintah harus menjadi fasilitator dan dinamisator. Kalangan legislatif juga harus memberi dukungan secara politis dalam rangka mensukseskan upaya pemberdayaan peternak tersebut secara berkesinambungan.●TROBOS

*Guru Besar Pemuliaan dan Genetika Ternak Fapet IPB
Ketua Umum Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia